

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Hermawan, 2019, *Penyelesaian sengketa hubungan industrial*, Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta 2019, *Penyelesaian sengketa hubungan industrial*
- Dalinama Telaumbanau, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Sleman*.
- Sri Subiandini Gultom, 2008, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, cet kedua Inti Prima Promosindo, Jakarta
- Husni, 2007, *Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwis Anatami, 2015 *Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Luar Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan,
- Harintian Abidin, A. Aco Agus, “Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Pada Serikat Pekerja PT. PLN (Persero),Wilayah,Sulselrabar)”,<http://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/3731/2153>.
- Muliarni, k. (2007). *Keabsahan Kontrak Kerja Outsourcing* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Much Nurachmad, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun*, (Jakarta: Visimedia, 2009), h.63
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2017), h.19.
- Abdul Hakim, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm.61

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta: Pustaka Belajar

Parlementaria. (1993). Jakarta: Bagian Hubungan Masyarakat DPR-RI

Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2010

Soebekti. (1960). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. V. Jakarta : Pembimbing Masa

Soerjono soekanto. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara Soerjono

Soekanto. (2004). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UIP

Undang-Undang

Undang-undang nomor 2 tahun 2004. tentang penyelesaian hubungan industrial.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2000. tentang serikat pekerja/serikat buruh.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 Ayat 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan soal *outsourcing* pasal 64 Perppu 2/2022, UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja